

**PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
PEREMPUAN DI INDIA: STUDI KASUS MAYAWATI KUNARI DAN
PERJUANGANNYA MELAWAN DISKRIMINASI POLITIK TERHADAP
PEREMPUAN DALIT**

Dinita Ayu Novela

Universitas Indonesia Depok, Indonesia

Email: dinita@gmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima : 27-06-2023	Budaya patriarki di India sudah melekat kedalam tatanan sosial dan politik masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi politik perempuan di India sangat kecil dan kehadirannya tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap politik dan pemerintahan di India. Kenyataan ini semakin diperkuat dengan adanya sistem kasta yang secara tidak langsung mendiskriminasikan peran perempuan terutama bagi mereka yang berasal dari kasta terendah, yaitu Dalit. Perempuan-perempuan Dalit tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga tingkat iliterasi meningkat tajam. Hal itu lah yang menyebabkan pengetahuan politik perempuan Dalit sangat minim. Kemudian, muncul seseorang bernama Mayawati Kunari yang merupakan perempuan Dalit dan Ia berhasil menjadi anggota parlemen di India karena pendidikan politik yang cukup baik. Melalui Mayawati, nasib perempuan Dalit saat ini jauh lebih baik dan mereka mampu menunjukkan kepada laki-laki bahwa perempuan dapat diandalkan dan dipercaya berada dalam kursi parlemen.
Direvisi : 13-05-2023	
Disetujui : 14-07-2023	
Kata kunci: Budaya Patriarki; Dalit; India; Mayawati Kunari.	

Keywords: Patriarchal Culture; Dalits; India; Mayawati Kunari.

ABSTRACT

The patriarchal culture in India is embedded in the social and political fabric of society. This is why women's political participation in India is very small and their presence cannot have a significant influence on politics and government in India. This fact is further reinforced by the existence of a caste system that indirectly discriminates against the role of women, especially for those from the lowest caste, namely Dalits. Dalit women do not get access to proper education, so the level of illiteracy increases sharply. This is what causes Dalit women's political knowledge to be minimal. Then, someone named Mayawati Kunari appeared who was a Dalit woman and she managed to become a member of parliament in India because of her good political education. Through Mayawati, the fate of Dalit women is currently much better and they are able to show men that women can be relied upon and trusted to be in the parliamentary seat.



Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Budaya patriarki yang secara umum diartikan sebagai dominasi peran laki-laki terhadap perempuan mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat yang disebabkan oleh peranan perempuan yang semakin berkembang terutama dari sisi kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi (Zuhri & Amalia, 2022). Namun pada kenyataannya, ketidaksetaraan gender menyebabkan perampasan kekuasaan di kalangan perempuan

semakin terlihat dalam dunia perpolitikan India saat ini. Dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari saja, peran perempuan India dikecualikan dalam setiap proses pengambilan keputusan di rumah tangga (Wahyudi, 2018). Sehingga, apabila perempuan berada dalam ranah kebijakan publik sekalipun, suara mereka tidak akan mudah mendapatkan aspirasi dengan baik. Konstitusi di India telah mencoba untuk menghapus ketidaksetaraan gender dengan melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kelas sosial, dan mengabadikan hak-hak dasar untuk semua warga negara, namun perempuan masih memiliki akses *de jure* dan bukan akses terhadap hak-hak politik secara *de facto* (Davis et al., 2017).

Keikutsertaan perempuan dalam setiap perpolitikan negara telah memberikan pesan yang kuat secara global tidak hanya berkaitan dalam hal kesetaraan dan kebebasan berekspresi, namun negara sebaiknya menyediakan ruang untuk perempuan dalam kerangka politik yang Demokratis (Agustin, 2016). Hal tersebut yang selalu menjadi penghalang bagi perempuan di India, meskipun negara tersebut memiliki salah satu hukum terkuat yang menghormati martabat perempuan, jika kembali pada adat istiadat, tatanan patriarkal, dan norma masyarakat yang selalu memperlakukan mereka layaknya berada dibawah kedudukan laki-laki. Di satu sisi, distribusi sumber daya di India tidak merata sehingga perempuan tidak memiliki kecukupan sumber daya, baik itu ekonomi, material, maupun sumber daya manusia. Perempuan di India cenderung bekerja pada sektor privat dan melarang mereka untuk bekerja di luar rumah. Dengan begitu, kondisi finansial perempuan di India sangatlah bergantung pada pihak laki-laki yang kemudian menjauhkan mereka pada afiliasi politik yang kuat (Alam, Alam, & Mushtaq, 2017).

Menanggapi minimnya partisipasi politik perempuan di India, terdapat sebuah konvensi yang mendukung peran perempuan, bernama *Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi kedalam konstitusi India tahun 1993. Dalam konteks memperjuangkan partisipasi perempuan ini, penulis akan fokus pada peran seorang Mayawati Kunari terhadap kelompok Dalit dalam parlemen di India (Pahlevi, 2018).

Mayawati Kunari dikenal sebagai anggota parlemen dari partai BJP (Bahujan Shamaj Party) pada tahun 1984. Sosok Mayawati ini banyak memberikan perhatian khusus kepada hak politik perempuan dari Kasta Dalit dalam pemerintahan di India. Hal itu disebabkan, Mayawati merupakan perempuan Dalit pertama yang mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dari wilayah Uttar Pradesh. Salah satu misi utama Mayawati adalah ingin menyetarakan kedudukan perempuan, khususnya dalit dan kelompok minoritas melalui tindakan afirmatif dengan membuka lapangan pekerjaan dalam pemerintahan dan membantu program-program pembangunan desa. Mayawati menyatakan dalam sebuah jumpa pers di Lucknow bahwa Partai Kongres terlalu bias dalam menghadapi kaum Dalit dan tidak mengusahakan apapun untuk memperbaiki sistem kasta dalam pemerintah. Di satu sisi, Mayawati juga menginginkan Partai Kongres agar men-sistematisasikan kepemimpinan Dalit mulai dari tingkat desa (panchayat) sampai ke tingkat parlemen.

Berdasarkan penjelasan diatas, budaya patriarki yang sudah melekat kuat baik dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik kemudian menimbulkan desakan dari berbagai kelompok minoritas di India, salah satunya adalah kelompok dalit (Athahirah & Nurdin, 2022). Hal ini dibuktikan melalui perjuangan seorang Mayawati Kunari yang merupakan perempuan Dalit mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dari Uttar Pradesh. Perjuangan Mayawati di parlemen memiliki satu tujuan, yaitu menghapus diskriminasi peran perempuan akibat budaya politik patriarki didalam parlemen. Oleh karena itu, penulis memiliki fokus penulisan jurnal dengan judul, “Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Partisipasi Politik Perempuan di India: Peran Mayawati Kunari dalam Memperjuangkan Diskriminasi Politik Perempuan. (Huda & Dodi, 2020)”

Ranjana Kumari menyatakan bahwa pada abad ke-21 ini pencapaian Demokrasi representatif disinyalir telah menyingkirkan sebagian besar kelompok masyarakat, salah satunya adalah perempuan. Hal inilah yang kemudian dirasakan oleh kaum perempuan di India, khususnya kelompok Dalit. Seperti pernyataan Lakshmi bahwa budaya patriarki merupakan perjuangan yang sangat berat untuk perempuan Dalit dalam memenangkan kursi di parlemen. Perempuan tidak diakui kemampuannya dalam berpolitik sehingga timbul minimnya kepercayaan dari kaum laki-laki. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan perempuan Dalit sangat lemah dari kaum laki-laki dan kasta yang lain, khususnya untuk bekerja dalam Panchayat (Dewan Desa). Perempuan Dalit mengalami berbagai diskriminasi kelas sebagai kasta terendah yang terlihat saat mereka mencalonkan diri dalam jabatan publik. Perempuan Dalit mengalami pelecehan seperti penolakan akan informasi, diabaikan, atau dibungkam dalam rapat, yang kemudian dalam beberapa kasus mereka memilih untuk keluar dari posisi mereka di parlemen (Rokhmansyah, 2016).

Persaingan yang cukup ketat antar wanita Dalit dalam pemerintahan terlihat jelas jika meninjau dari penelitian yang mengatakan bahwa hanya sepertiga dari 200 jumlah wanita Dalit yang mendapatkan posisi penting di pemerintahan. Kedudukan perempuan Dalit di parlemen tidak mungkin terlepas dari dua faktor, yaitu pendidikan dan pengalaman sosial. Contohnya, seperti tingkat buta huruf yang cukup tinggi merupakan rintangan utama yang kemudian menyulitkan mereka untuk mempelajari politik di negaranya sendiri. Hal tersebut dibuktikan melalui pernyataan Manorama Gupta bahwa India merupakan negara dengan tingkat buta huruf tertinggi di dunia melalui penelitian yang dilakukan oleh United Nations pada Januari 2014, yaitu sebesar 284 juta perempuan dewasa di India mengalami buta huruf. Selain menyebabkan kurangnya pengetahuan politik, perempuan di India juga mengalami eksploitasi melalui daftar pemilih, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memastikan hak politik mereka diperhitungkan. Oleh karena itu, dengan rendahnya status sosial, pendidikan, ekonomi, dan gender pada perempuan tersebut secara tidak langsung kedudukan mereka akan dikuasai dengan mudah oleh kekuatan dominan. Melalui permasalahan tersebutlah yang kemudian menggerakkan peran Mayawati untuk melawan diskriminasi peran perempuan dalam politik dan pemerintahan di India.

Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu fenomena secara lebih spesifik dan komprehensif (Neuman, 2007). Adapun, penelitian ini secara garis besar termasuk dalam jenis penelitian sosial yang diproyeksikan dapat mengumpulkan dan menganalisis berbagai temuan penelitian yang diperoleh, sehingga mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan (Payne & Payne, 2011). Kemudian, terkait dengan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah informan yang dianggap memiliki kompetensi yang cukup dan relevan dengan fokus permasalahan penelitian ini, sehingga output yang diperoleh nantinya termasuk dalam jenis data primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang merujuk pada literatur-literatur terkait, baik itu dalam bentuk buku, artikel jurnal, publikasi-publikasi ilmiah dan institusi maupun publikasi-publikasi yang sifatnya daring. Untuk itu, berikut ini merupakan daftar informan yang akan dijadikan sebagai rujukan.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi politik perempuan dapat diukur dalam tiga dimensi yang berbeda. Pertama, partisipasi perempuan sebagai pemilih, kedua, partisipasi perempuan sebagai perwakilan yang terpilih, dan yang terakhir, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan (Wibowo, Rahmawan, & Syafaat, 2020). Ketiga dimensi partisipasi politik tersebut terasa sulit untuk dipraktikkan oleh perempuan di India. Meskipun diberi predikat sebagai negara demokrasi terbesar dunia, India memiliki tingkat keterwakilan perempuan dalam politik yang sangat rendah. Pada kenyataannya, perempuan di India dihadapkan berbagai macam masalah dan kritik ketika memutuskan untuk terjun dan terlibat langsung di dunia politik. Oleh karenanya, India berada di peringkat ke 111 dalam tingkatan dunia terkait dengan jumlah perempuan di parlemen nasional (Astuti, Afandi, & Listuani, 2019).

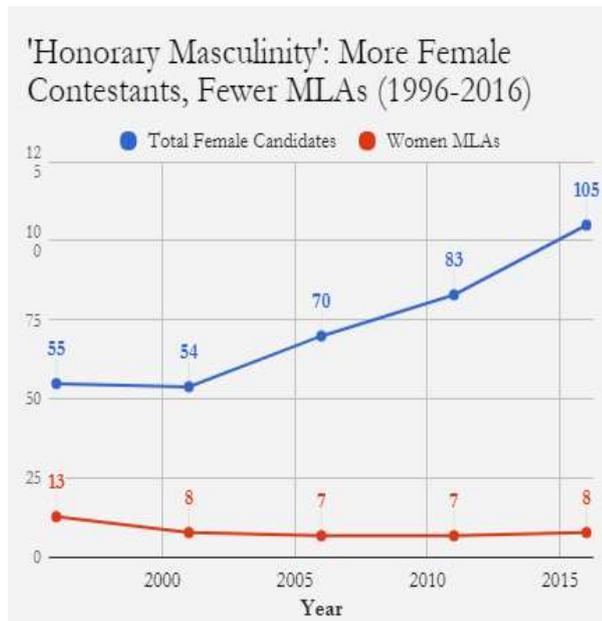
Secara umum, hambatan terbesar untuk perempuan berpartisipasi dalam politik di India disebabkan oleh norma sosial dan budaya masyarakat yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta tingkat buta huruf yang tinggi. Pertama, sikap diskriminasi yang dialami perempuan India terwujud dalam keterbatasan mereka untuk mengakses informasi dan sumber daya dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan karena norma sosial dan budaya masyarakat India membentuk pola pikir perempuan berada di kelas yang lebih rendah dari laki-laki. Kedua, kekerasan, terutama kekerasan seksual, mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bentuk hubungan sosial dan politik. Terakhir, buta huruf membatasi kemampuan perempuan untuk memahami sistem dan isu politik.

Berbeda dengan kondisi perempuan India pada umumnya, Kerala, suatu daerah di India bagian selatan, kondisi dan status perempuan di daerah tersebut telah berkembang

pesat. Indikator pembangunan tradisional telah menunjukkan bahwa status perempuan di Kerala sangat baik, terutama jika dibandingkan dengan situasi perempuan di wilayah India lainnya. Kerala merupakan satu-satunya negara bagian di India yang mana tingkat melek huruf pada perempuan sama dengan tingkat melek huruf laki-laki. Selain itu, berkat sistem matriarki yang berlaku di komunitas Nair mampu membuat perempuan di Kerala memperoleh pendidikan dan memiliki tingkat kesehatan yang baik. Dengan pendidikan, perempuan di Kerala memiliki perspektif yang lebih luas terhadap masyarakat dan menyadari peran mereka di dalamnya.

Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan status sosial politik seseorang. Pendidikan dan tingkat kesehatan yang baik diyakini sebagai langkah awal perempuan dalam berpolitik. Dengan pendidikan dan kesehatan yang sedemikian rupa, maka seharusnya perempuan di Kerala memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Ditambah lagi dengan hadirnya Amandemen ke-73 dan ke-74 pada Konstitusi India pada tahun 1992 dan 1993, yang mengatur reservasi kursi dan jabatan sebesar 33% untuk perempuan di semua tingkatan daerah atau yang dikenal sebagai Panchayats. Amandemen ini merupakan suatu bentuk tindakan afirmatif yang memastikan perempuan mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki dalam struktur kekuasaan politik.

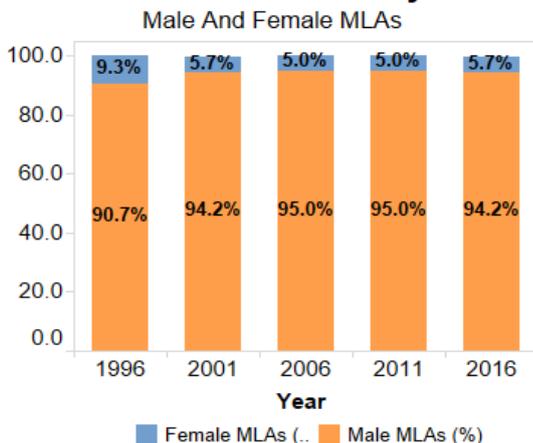
Kondisi perempuan di Kerala memang berbeda dengan kondisi perempuan di India pada umumnya. Ia memiliki akses terhadap pendidikan dan tingkat kesehatan yang baik. Namun, pada kenyataannya kesadaran dan partisipasi politik perempuan di Kerala tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan dan kesehatan tersebut. Meskipun dengan kondisi perempuan di Kerala yang sedemikian rupa, tingkat partisipasi perempuan terbatas dilihat dari minimnya jumlah perempuan pada tingkat pengambilan keputusan. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran perempuan sebagai legislator yang tidak mengalami peningkatan sejak 20 tahun belakangan. Grafik di bawah menunjukkan jumlah kandidat perempuan yang terpilih di parlemen nasional Kerala tahun 1996-2015.



Sumber: <http://www.indiaspend.com/cover-story/in-kerala-women-surge-into-politics-and-fail-64992>

Amandemen ke-73 dan ke-74 pada Konstitusi India sejatinya memainkan peran penting untuk memastikan perempuan dibelahan India manapun dapat berpartisipasi secara aktif. Dapat dilihat grafik diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah kontestan perempuan dari sejak tahun 1996 hingga 2015. Namun, partisipasi perempuan sebagai perwakilan yang terpilih tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Di tahun 2015, dari 105 kontestan perempuan yang mendaftar hanya 8 orang yang terpilih. Berikut grafik perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam pemilihan di Kerala.

Women In Kerala Assembly Elections



Sumber: <http://www.indiaspend.com/cover-story/in-kerala-women-surge-into-politics-and-fail-64992>

Grafik di atas memberikan gambaran mengenai perbandingan jumlah kontestan laki-laki yang lebih mendominasi dari jumlah kontestan perempuan. Sejak tahun 1996 hingga tahun 2016, jumlah kontestan yang terpilih tidak melebihi angka 10%. Jumlah keterpilihan perempuan tertinggi terjadi pada tahun 1996. Namun, jumlah tersebut terus menurun hingga mencapai angka 5,7% pada tahun 2016. Menurut beberapa laporan, banyak politisi atau kontestan perempuan yang merasakan kesulitan ketika berpartisipasi dalam politik. Penyebab utama dari kesulitan tersebut adalah untuk menyamakan kesenjangan gender yang ada antara perempuan dan laki-laki.

Tidak terpilihnya kontestan perempuan dalam pemilihan umum dapat dijelaskan karena budaya patriarki yang telah melekat erat dengan kebudayaan India. Marginalisasi kelompok perempuan lahir sebagai hasil dari sikap dan praktik kebudayaan patriarki yang mengakar kuat. India sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia memiliki Amendemen ke 73 konstitusi India sebagai salah satu hukum terkuat untuk memberi keleluasaan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Tetapi, adat istiadat budaya patriarki yang berlaku sebagai norma di masyarakat selalu memosisikan perempuan dibawah laki-laki. Perempuan diajarkan untuk tunduk kepada laki-laki karena dianggap tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dari segi ekonomi maupun sebagai sesama manusia. Dengan pola pikir yang sedemikian rupa, maka perempuan dipercaya tidak memiliki kapabilitas yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, partisipasi perempuan sebagai perwakilan yang terpilih tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Konteks patriarki menjadi salah satu alasan untuk perempuan tidak terlibat dalam arena politik.

Lebih lanjut, perempuan Dalit kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatif serta berada di dalam ikatan patriarkis di dalam masyarakat. Dalam memperjuangkan hak-haknya untuk melawan diskriminasi, perempuan-perempuan Dalit melakukan gerakan sosial dan politik dengan memiliki tuntutan-tuntutan yang diajukan kepada pemerintah terutama mengenai partisipasi perempuan Dalit di Panchayati Raj. Salah satu gerakan perempuan Dalit ialah gerakan Dalitbahujan Samaj Movement yang dinisiasi oleh Bahujan Samaj Party atau (BSP), memiliki agenda tuntutan untuk memperoleh hak-hak kesetaraan, kesempatan dalam sosial-ekonomi dan mengkonsolidasi jaminan pemerintah pusat mengenai jumlah kursi untuk perempuan Dalit sebagaimana tercantum di dalam Panchayati Raj Act (Govinda, 2006). Adanya gerakan Dalitbahujan Samaj Movement yang diinisiasi oleh partai BSP ini telah meningkatkan kepercayaan diri perempuan-perempuan Dalit yang kemudian terlibat di dalam kontestasi pemilihan umum untuk meraih kursi di Panchayati Raj.

Perjuangan perempuan Dalit untuk memperoleh hak-hak kesetaraan dan keterlibatan dalam politik pun di fasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM-LSM yang mendorong kesadaran perempuan Dalit untuk mengetahui hak-haknya, memberikan Pendidikan, dan memberikan kesadaran perempuan Dalit untuk terlibat di dalam ranah politik. Hadirnya LSM yang membantu perempuan-perempuan Dalit ini

kemudian membentuk suatu relasi dengan Bahujan Samaj Party atau BSJ di Uttar Pradesh untuk memberikan pemahaman mengenai politik, hak-hak perempuan, serta identitasnya. Meskipun kedua elemen ini memiliki perbedaan ruanglingkup interaksi namun keduanya saling melengkapi dimana BSJ memberikan adanya politik keterwakilan sedangkan LSM dapat mempromosikan identitas nya sebagai perempuan dan Dalit. Adanya gerakan sosial dan politik yang mengupayakan keterlibatan perempuan Dalit di dalam ranah serta memperjuangkan hak-haknya merupakan suatu bentuk untuk mendorong terealisasinya kesetaraan di dalam tatanan masyarakat India.

Dalam menjalani kehidupan sebagai perempuan Dalit yang memasuki ranah politik dengan terlibat di dalam lembaga pemerintahan yakni, Panchayati Raj, mereka kerap kali mendapatkan hambatan-hambatan. Hambatan yang dialami oleh perempuan Dalit yakni, status gender, kasta, dan ekonomi yang rendah menyebabkan perempuan Dalit mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan sehingga tingkat literasi pada perempuan Dalit menjadi rendah, ikatan patriarkis pun menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh perempuan Dalit. Hambatan yang berasal dari keluarga Perempuan Dalit ketika keluarganya tidak mendukung sehingga mobilitas perempuan Dalit menjadi terbatas sebab mereka membutuhkan izin dari suami atau keluarga untuk berpergian terutama di malam hari. Terlebih lagi, perempuan Dalit kerap kali mengalami keterpaksaan untuk terlibat di dalam ranah politik oleh suaminya sehingga mereka mendapatkan tekanan yang besar dari suami.

Selain faktor hambatan yang berasal dari keluarga, hambatan yang muncul selanjutnya datang dari lingkungan Panchayati Raj itu sendiri. Dominasi laki-laki yang begitu kuat di dalam Panchayati Raj ditunjukkan dengan perlakuan anggota laki-laki yang memiliki kecenderungan untuk menekan kebebasan berpendapat perempuan Dalit pada rapat-rapat yang diselenggarakan. Penekanan kebebasan berpendapat ini, mereka menyatakan bahwa seharusnya perempuan Dalit tidak berbicara di depan kasta dominan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perempuan Dalit mendapatkan perlakuan yang diskriminatif yang berakibat pada sulitnya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan Dalit di dalam Panchayati Raj. Kemudian, hambatan yang dihadapi oleh perempuan Dalit mereka mendapat tuduhan bahwa perempuan Dalit dinilai tidak kompeten untuk dapat mengatur institusi publik. Hambatan-hambatan tersebut membuat perempuan Dalit mengalami diskriminasi, keterbatasan mobilitas yang kemudian akan berpengaruh pada aspirasi yang dimilikinya sebab adanya hambatan-hambatan tersebut sangat menghambat upaya untuk menyelesaikan agenda perempuan Dalit untuk mendapatkan kesetaraan dan kehidupan yang lebih layak meskipun secara fisik mereka hadir di dalam Panchayati Raj namun aspirasi mereka mengalami kesulitan untuk diwujudkan.

Berdasarkan konsep kehadiran yang dikemukakan oleh Phillips merupakan bentuk representasi politik yang tidak hanya memberikan gagasannya melainkan kontribusinya sesuai dengan pengalaman mereka. Kemudian politik kehadiran tersebut sebagai bentuk respon mengenai gender, ras, dan suku yang termarginalkan dari masyarakat. Dalam konteks representasi politik perempuan Dalit merupakan suatu

bentuk politik kehadiran. Hal ini disebabkan oleh perempuan Dalit merupakan kelompok yang termarginalkan dari masyarakat baik mereka berasal dari kasta rendah yakni, Dalit dan identitas mereka sebagai perempuan. Phillips menjelaskan bahwa didalam lembaga legislatif harus terdapat kehadiran kelompok minoritas dan perempuan sebab mereka dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya di Parlemen. Di India sendiri, penetapan mengenai kuota representasi kaum Scheduled Caste atau kasta terendah, Kasta yang berasal dari suku-suku, dan perempuan telah diatur di dalam Amandemen konstitusi 73 tahun 1993 yang menetapkan adanya kursi yang diperuntukan untuk kalangan-kalangan tersebut di dalam Panchayati Raj.

Dalam upaya meraih kedudukan di Panchayati Raj perempuan Dalit terlibat dalam gerakan-gerakan sosial dan politik untuk menuntut pemerintah pusat agar dapat mengakomodasi tuntutan-tuntutannya termasuk keterlibatan perempuan Dalit di politik. Pergerakan yang dilakukan oleh perempuan Dalit diinisiasi oleh salah satu partai politik yakni, partai Bahujan Samaj Party atau BSP yang menginisiasi terciptanya Dalitbahujan Samaj Movement. Selain, mendapat dukungan dari partai BSP, perempuan Dalit pun mendapat dukungan dari LSM-LSM yang memberikan pemahaman mengenai hak-hak serta identitas yang dimilikinya. Pergerakan perempuan Dalit ini mampu mendorong meningkatnya partisipasi perempuan Dalit di Panchayati Raj sehingga hadirnya perempuan Dalit merepresentasikan golongan minoritas dan perempuan. Namun, dalam kenyataannya ketika perempuan Dalit berada di dalam institusi pemerintahan yakni, Panchayati Raj, mereka mengalami sejumlah hambatan yang mempengaruhi aspirasi atau agenda kepentingan yang dimilikinya. Hambatan tersebut terbagi menjadi, hambatan yang berasal dari keluarga dan hambatan yang berasal dari anggota-anggota institusi Panchayati Raj itu sendiri. Hambatan yang berasal dari keluarga menimbulkan keterbatasan mobilitas perempuan Dalit serta hubungan patriarkis yang melemahkan Perempuan Dalit itu sendiri. Kemudian, hambatan yang berasal dari anggota-anggota institusi Panchayati Raj ialah mengenai sentiment ras dan identitas yang dimiliki oleh Perempuan Dalit. Perempuan Dalit kerap kali disudutkan sebagai kalangan yang memiliki kasta rendah sehingga mereka tidak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya di dalam rapat-rapat, kemudian Perempuan Dalit dinilai tidak kompeten sebab pada umumnya Perempuan Dalit tidak memperoleh Pendidikan tinggi sebagaimana kasta-kasta tinggi yang memiliki latar Pendidikan tinggi.

Ketika hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi representasi perempuan Dalit di parlemen maka mereka mengalami kesulitan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya. Jika melihat dari kategorisasi pembagian kelompok minoritas dan perempuan di parlemen menurut Phillips, representasi perempuan Dalit termasuk dalam kategorisasi representasi deskriptif. Hal ini disebabkan karena Perempuan Dalit terlibat di dalam politik akan tetapi hanya bersifat simbolik yang berarti secara kuantitas dan secara kehadiran Perempuan Dalit memang terlibat di dalam Panchayati Raj namun Perempuan Dalit masih mendapatkan hambatan-hambatan untuk dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang membawa kepentingan baik kepentingan mengenai Perempuan maupun kepentingan mengenai Dalit itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya untuk memperjuangkan hak-haknya dengan terlibat di dalam Panchayati Raj, perempuan Dalit melakukan gerakan-gerakan sosial dan politik. Gerakan sosial dan politik yang dilakukan oleh perempuan Dalit diinisiasi oleh partai BSP dan LSM-LSM yang membantu memberikan Pendidikan dan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki oleh perempuan Dalit. Adanya gerakan-gerakan tersebut mampu mendorong representasi perempuan Dalit di dalam Panchayati Raj meningkat tentunya dengan melalui mekanisme pemilihan umum sebelumnya. Namun, ketika perempuan Dalit terlibat di dalam Panchayati Raj mereka mengalami hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses aspirasi yang dilakukan oleh Perempuan Dalit. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari keluarga dan dari anggota-anggota institusi Panchayati Raj yang memberikan dampak sulitnya perempuan Dalit untuk melakukan mobilitas politik, terjadinya diskriminasi terhadap Perempuan Dalit baik oleh laki-laki di dalam Panchayati Raj maupun golongan kasta tinggi yang melihat Perempuan Dalit tidak layak untuk mengemukakan pendapatnya. Hambatan-hambatan tersebut membuat representasi politiknya hanya bersifat simbolik saja sebab mereka masih mengalami kesulitan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan substansial yang menyangkut kepentingan Perempuan Dalit itu sendiri.

Sistem Kasta di India

Sistem kasta di India telah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya politik (Maulana & Putra, 2021). Hal ini dibuktikan melalui sebagian besar anggota parlemen perempuan berasal dari kasta yang lebih tinggi, sehingga kasta memainkan peran penting dalam menentukan peluang dan dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat India. Terdapat empat kasta besar yang sangat berpengaruh, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selain kasta besar ini terdapat pula kasta minoritas yang termasuk kedalam kelompok Ati-Shudras yaitu Dalit. Mereka terpinggirkan dan sering mendapat perlakuan yang diskriminatif. Oleh karena itu upaya untuk menyingkirkan ketidaksetaraan berdasarkan kasta membuat beberapa raja dan koloni Inggris mengenali sebagian besar populasi kasta rendah dan populasi religius yang terpinggirkan secara historis, serta secara tidak langsung kasta sangat mempengaruhi profil, loyalitas, dan kerja perwakilan di Parlemen India (Permatasari Rafiun, 2020).

Ketika perempuan di India menghadapi situasi dimana mereka ingin bekerja di pemerintahan, mereka harus berunding dengan keluarganya. Akan lebih mudah jika perempuan ini berasal dari elit politik dengan lebih dari satu anggota yang berpartisipasi dalam politik. Jika perempuan itu sudah aktif dalam kehidupan politik sebelum menikah, ia bisa menghadapi tekanan luar biasa dari keluarga suaminya agar sesuai dengan peran tradisional yang memungkinkan sedikit ruang untuk mengejar karir politik yang aktif, sehingga pilihan terberatnya antara memilih keluarga dengan keluar dari politik atau meninggalkan keluarga untuk mengejar masa depan yang tidak pasti dalam politik. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan keluarga dan stigma

perceraian merupakan kelemahan yang jelas bagi wanita dalam politik (Permataningtyas, 2021).

Mayawati Kunari adalah seorang perempuan Dalit berasal dari Uttar Pradesh. Ia merupakan seorang pengagum Ambedkar yang kemudian menjadi dorongan untuk melawan sistem kasta. Setiap tanggal 14 April, Ia dan keluarganya pergi ke Delhi untuk merayakan Ambedkar Jayanti. Perayaan ini dipandang sebagai proses 'mobilisasi sosial' bagi masyarakat Dalit, sehingga mendorong kesadaran akan hak seseorang di bawah konstitusi yang membuka jalan bagi mobilisasi dan kebangkitan politik. Kemudian, Mayawati terlibat kedalam politik Dalit yang radikal. Ia termasuk kedalam generasi ketujuh puluhan wanita Dalit muda, perkotaan, berpendidikan, yang merasa terganggu dengan pengkhianatan bersejarah tentang kasta mereka oleh Partai Kongres. Peran Mayawati sebagai citra politik Dalit, tetap saja harus melawan berbagai bentuk "penindasan ganda" yaitu kasta dan gender. Hal ini dibuktikan ketika Perdana Menteri dari Dalit akan memiliki dampak besar pada skenario politik nasional dan melibatkan kaum Dalit ke dalam arus utama sosial. Wilayah Uttar Pradesh kemudian menjadi laboratorium politik karena wilayah ini dipandang sebagai mikrokosmos India.

Selain itu, Mayawati Kunari muncul sebagai sosok perempuan dari kelompok kasta minoritas, yaitu Dalit yang kemudian mampu membuktikan bahwa perempuan-perempuan di India menjadi anggota parlemen. Keinginan Mayawati untuk memperjuangkan partisipasi politik perempuan Dalit ini berangkat dari konsep bias gender yang mengakar kuat di India, dimana laki-laki adalah sosok individu yang kuat dan mampu mengerjakan segala sesuatu dengan baik, sedangkan perempuan hanyalah individu yang lemah dan identik dengan pekerjaan rumah untuk mengurus anak, keluarga, dan membahagiakan suami. Konteks tersebut tidak hanya dirasakan oleh perempuan Dalit saja melainkan perempuan dari kasta yang lebih tinggi dan berpendidikan juga merasakan hal yang sama. Namun yang membedakan dengan perempuan Dalit adalah kasta terendah yang terpinggirkan, sehingga perhatian pemerintah dari segi pendidikan pun sangat minim. Hal tersebutlah yang mengakibatkan tingkat iliterasi perempuan Dalit cukup tinggi dan mengakibatkan mereka "buta" terhadap politik.

Terpilihnya Mayawati di parlemen kemudian langsung mengupayakan berbagai usaha untuk membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan Dalit di pemerintahan dan membantu program desa. Hal tersebut sesuai dengan konsep bias gender dalam institusi ekonomi yaitu lapangan pekerjaan yang mana antara perempuan dan laki-laki dibedakan dari segi pekerjaannya. Mayawati ingin menghapuskan diskriminasi patriarkal dalam konsep bias gender yang menyatakan bahwa perempuan hanya memiliki lapangan pekerjaan yang sangat minim dan monoton, yaitu rumah tangga, sedangkan laki-laki lah yang bekerja pada perusahaan. Oleh karena itu, Mayawati membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan Dalit dan minoritas di India. Hal tersebut secara tidak langsung mampu mematahkan sentimen negatif kaum laki-laki di India bahwa perempuan dapat dipercaya untuk bekerja di parlemen meskipun di satu sisi mereka juga harus mengurus rumah tangganya. Pernyataan tersebut sebenarnya masih belum bisa direalisasikan

seutuhnya, karena India masih terbentur dengan budaya dan adat istiadat. Sehingga, peran perempuan untuk terjun dalam politik masih terus diusahakan agar partisipasi politik perempuan meningkat dan tidak ada lagi budaya patriarki yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat India.

Kesimpulan

India merupakan negara Demokrasi terbesar di dunia sebagai negara yang relatif otonom dan perekonomian yang sangat maju. Jika ditinjau dari politik dan pemerintahannya, India masih kurang terbuka dengan kehadiran perempuan di parlemen sebagai representasi masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian berimbas pada dunia perpolitikan India. Oleh sebab itu, muncul sosok perempuan yang memiliki tujuan mulia setelah terpilihnya Ia di parlemen. Uniknya adalah kemunculan Mayawati ini bukanlah perempuan yang berasal dari kasta tetinggi melainkan kasta terendah, yaitu Dalit. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik Dalit di India sudah cukup tinggi, walaupun budaya dan adat istiadat masih membatasi peran perempuan untuk terjun dalam politik. Namun, kehadiran Mayawati sudah membuka jalan bagi perempuan untuk bekerja di parlemen dan memperjuangkan perempuan dari diskriminasi politik di India.

Bibliografi

- Agustin, Maya Nur. (2016). Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(4). <https://doi.org/10.26740/kmkn.v3n4.p%25p>
- Alam, G. M. Monirul, Alam, Khorshed, & Mushtaq, Shahbaz. (2017). Climate change perceptions and local adaptation strategies of hazard-prone rural households in Bangladesh. *Climate Risk Management*, 17, 52–63.
- Astuti, Pudji, Afandi, Muhammad Arif, & Listuani, R. H. (2019). Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur. *Jurnal Litbang Kebijakan*. Surabaya: Cakrawala, 13(2), 1–24.
- Athahirah, Astika Ummi, & Nurdin, Nurliah. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: sebuah tinjauan teoritis dan praktis*. CV. Sketsa Media.
- Davis, Alan L., Carcillo, Joseph A., Aneja, Rajesh K., Deymann, Andreas J., Lin, John C., Nguyen, Trung C., Okhuysen-Cawley, Regina S., Relvas, Monica S., Rozenfeld, Ranna A., & Skippen, Peter W. (2017). The American College of Critical Care Medicine clinical practice parameters for hemodynamic support of pediatric and neonatal septic shock: executive summary. *Pediatric Critical Care Medicine: A Journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies*, 18(9), 884.
- Huda, H. M. Dimiyati, & Dodi, Limas. (2020). *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya*. CV Cendekia Press.
- Maulana, I. Putu Ari Putra, & Putra, Ida Bagus Gede Dharma. (2021). Metafora konseptual kasta dalam masyarakat Bali: Kajian linguistik kognitif. *PRASI*, 16(02), 92–104.
- Pahlevi, Farida Sekti. (2018). Peran Kesenian Tradisional Dongkreng Sebagai Media Pendidikan Nilai Moral. *Jurnal Ibriez: Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 3(2), 221–234.
- Permataningtyas, Winny. (2021). Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender sebagai Tantangan Utama Good Governance di India. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 4(1), 134–153.
- Permatasari Rafiun, Indah. (2020). *Pengaruh CARE India Dalam Upaya Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender di India*. Universitas Bosowa.
- Rokhmansyah, Alfian. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- Wahyudi, Very. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 7, Juli 2023

Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Di India: Studi Kasus Mayawati Kunari Dan Perjuangannya Melawan Diskriminasi Politik Terhadap Perempuan Dalit

Jurnal Politik Islam, 1(1), 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>

Wibowo, Kunto Adi, Rahmawan, Detta, & Syafaat, Azman Hamdika. (2020). Efikasi politik dan jenjang partisipasi politik pemilih pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 152–165. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26433>

Zuhri, Saifuddin, & Amalia, Diana. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).